

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2018 terjadi bencana yang cukup besar di Indonesia yaitu kejadian bencana Tsunami Selat Sunda. Kejadian Bencana Tsunami Selat Sunda terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 yang disebabkan oleh longsoran dari sebagian badan Gunung Anak Krakatau ke laut setelah gunung mengalami erupsi. Berdasarkan catatan Badan Informasi Geospasial gelombang tsunami terjadi di Marina Jambu (Cinangka) setinggi 0,9 meter, Ciwandan (Anyer) setinggi 0,35 meter, Kota Agung setinggi 0,36 meter, dan di Pelabuhan Panjang (Bandar Lampung) setinggi 0,28 meter. Berdasarkan hasil survey BMKG (2019) didapatkan hasil estimasi ketinggian tsunami seperti pada **Tabel 1.1**.

Tabel 1.1 Estimasi Ketinggian Tsunami Selat Sunda Tahun 2018

No.	Lokasi Survey	Ketinggian (Meter)
1.	Tanjung Lesung	± 4,20 sampai dengan 5,03
2.	Mutiara Carita	± 2,26 sampai dengan 5,56
3.	Cinangka	± 2,72 sampai dengan 3,19
4.	Tide Gauge Marina Jambu	± 2,46
5.	Desa Teluk Labuan	± 1,47 sampai dengan 3,07

Sumber : BMKG tahun 2019.

Dampak dari Tsunami Selat Sunda secara keseluruhan mengakibatkan 431 orang meninggal, 7,200 orang luka-luka, 15 orang dinyatakan hilang, dan sebanyak sebanyak 46,646 orang mengungsi. Selain korban jiwa Tsunami Selat Sunda juga berdampak pada kerusakan, yaitu kerusakan rumah yang terdiri dari kerusakkan rumah yang terdiri dari rumah rusak berat sebanyak 1,527 unit, rumah rusak sedang sebanyak 70

unit, dan rumah rusak ringan sebanyak 181 unit. Terdapat juga penginapan dan warung yang rusak sebanyak 76 unit, dan kerusakan perahu serta kapal yang rusak sebanyak 432 buah. Secara keseluruhan korban dan kerusakan berasal dari lima Kabupaten yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Tanggamus (BMKG, 2019).

Di Kabupaten Pandeglang, berdasarkan data yang dihimpun oleh BNPB per tanggal 8 Januari 2019 bencana Tsunami Selat Sunda menyebabkan 296 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, 675 orang mengalami luka-luka, dan sebanyak 3.553 orang mengungsi. Bencana tsunami juga mengakibatkan 1.033 unit rumah di pesisir Pandeglang mengalami kerusakan yang terdiri dari 162 unit rusak berat, 209 unit rusak ringan, dan 115 unit rusak sedang. Tsunami tersebut juga membuat jalan raya penghubung Serang-Pandeglang putus. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPBD Kabupaten Pandeglang (2019), akibat dan dampak tsunami tersebut didapatkan total nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 260.068.971.673,- dengan rincian sektor permukiman sebesar Rp. 56.730.703.000,- (21,8%), sektor infrastruktur sebesar Rp. 34.914.632.303,- (13,4%), sektor sosial sebesar Rp. 14.357.217.200,- (5,5%), sektor ekonomi sebesar Rp. 152.960.102.130,- (58,8%) dan lintas sektor sebesar Rp. 1.106.317.040,- (0,4%).

Berdasarkan data kerusakan di atas sektor perumahan adalah sektor yang terdampak cukup parah oleh adanya Tsunami Selat Sunda. Dari total nilai kerusakan dan kerugian yang didapat diperkirakan total kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang adalah sebesar Rp. 349.410.771.825,-. Pembagian penggunaan dana tersebut secara rinci yaitu : sektor permukiman sebesar Rp. 102.677.072.000,- (29,4%), sektor infrastruktur sebesar Rp. 108.655.779.017,- (31,1%), sektor sosial Rp. 1.410.304.000,- (0,4%),

sektor ekonomi Rp. 133.504.121.808,- (32,5%) dan lintas sektor Rp. 23.163.495.000,- (6,6%) (BPBD Kabupaten Pandeglang, 2019).

Pemulihan sektor perumahan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sudah dimulai semenjak masa transisi dengan membangun hunian sementara bagi korban terdampak tsunami di Kabupaten Pandeglang. Menurut Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang Surya Darmawan, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) mulai dibangun pada tahun 2019 untuk 706 kepala keluarga (KK) korban Tsunami Selat Sunda yang tersebar pada 8 titik pembangunan huntap yaitu Desa Sukarame Kecamatan Carita, Desa Banyumekar Kecamatan labuan, Mekarsari Kecamatan Panimbang, Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur, Desa Tunggaljaya Kecamatan Sumur, Cigorondong Kecamatan Sumur, Tamanjaya Kecamatan Sumur, dan Ujungjaya Kecamatan Sumur.

Pada bidang perumahan di Pandeglang, pemerintah merelokasi perumahan di sepanjang pesisir khususnya yang rawan terdampak tsunami di pesisir Anyer sampai ke Sumur (news.detik.com, 2018). Dilansir dari *website* Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) menargetkan pembangunan Hunian tetap (Huntap) bagi rumah dalam katagori rusak berat akibat tsunami di Kabupaten Pandeglang selesai pada Agustus tahun 2019. Namun, untuk membangun Huntap korban bencana tsunami di Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Pemerintah Kabupaten Pandeglang harus melakukan pembebasan 8.000 meter lahan karena lahan sebelumnya tidak cukup untuk memenuhi jumlah Huntap bagi masyarakat terdampak (bantenraya.com, 2021). Dengan demikian, hingga Maret 2021 Huntap untuk masyarakat beberapa belum dapat diselesaikan. Tahapan pembangunan hunian sementara sudah dimulai sejak bulan April tahun 2020 dengan proses lelang. Tetapi masih terdapat kendala untuk pembangunan di desa Sumber Jaya karena kekurangan lahan seluas 4 hektar.

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang Tahun 2019-2020 menyebutkan prioritas pemulihan adalah sektor permukiman karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Untuk relokasi, kebutuhan lahan disediakan atau dibiayai oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan dana stimulan untuk pembangunan rumah dan prasarana lingkungan permukiman disediakan atau dibiayai oleh Pemerintah. Sedangkan penetapan prioritas pemulihan perumahan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yaitu pada pasal 55 ayat 2 dan 3 yang menyatakan bahwa untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pada tanggal 22 Desember 2020 tepat 2 tahun pasca bencana Tsunami Selat Sunda dilakukan penyerahan hunian tetap oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB sebanyak 483 unit yang tersebar di empat kecamatan diantaranya Kecamatan Labuan, Sumur, Panimbang dan Kecamatan Carita. Sisa 223 unit lagi masih terkendala proses pembebasan lahan sehingga belum dapat diberikan untuk masyarakat. Lokasi pembangunan hunian tetap yang sudah diresmikan dan ditempati berada di Desa Sukarame Kecamatan Carita, Desa Banyumekar Kecamatan Labuan, dan Desa Tunggaljaya, Desa Tamanjaya, Desa Cigorondong dan Desa Ujungjaya, Kecamatan Sumur. Sedangkan lokasi yang belum dibangun pada tahun 2020 yaitu warga desa yang masih menetap di hunian sementara (Huntara) yang berlokasi di Kampung Pasir Malang, Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan stimulan untuk rumah rusak berat per unit sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, sedangkan untuk rumah yang mengalami rusak ringan akibat tsunami Selat Sunda sebesar Rp 10 juta.

Walaupun masih ada beberapa Huntap yang hingga kini belum rampung diselesaikan, namun proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan masyarakat Kabupaten Pandeglang dinilai selesai dengan cepat. Menurut Kepala Deputi Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, bencana tsunami Selat Sunda merupakan bencana besar paling baru dibandingkan bencana tsunami di daerah lain seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah yang terjadi di tahun 2018 tetapi pembangunan hunian tetap di Kabupaten Pandeglang ini pekerjaannya tergolong sangat cepat jika dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lain di Indonesia, konstruksi bangunannya juga sangat baik, dan progres pembangunannya. Swakelola pada mekanisme pelelangan yang bagus menunjang proses pembangunan hunian tetap selesai dengan cepat mulai dari kontrak pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan sampai monitoring yang melibatkan pengawasan masyarakat pembangunannya sehingga waktu dan kualitas konstruksi Huntap di Kabupaten Pandeglang memiliki kualitas yang baik.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang, Girgijantoro, menyatakan bahwa bencana tsunami tidak memberikan dampak kerusakan infrastruktur yang signifikan. Kerusakan infrastruktur akan memberikan dampak signifikan bagi aktivitas masyarakat terdampak untuk kembali normal. Kerusakan infrastruktur dapat menghambat proses distribusi bantuan dikarenakan putusnya akses jalan atau jembatan pasca tsunami. Selain itu, infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah juga dilakukan untuk menjadi stimulus bagi masyarakat sehingga dampak seperti kemiskinan, putus sekolah, dan kriminalitas dapat dihindarkan.

Fasilitas yang mengalami kerusakan tergolong parah, terdapat di Kecamatan Sumur, tepatnya pada ruas jalan Sumur-Tamanjaya di kilometer 6.5 hingga 7.5, serta jalan di kilometer 14 sampai 16. Dan bila dihitung dari nilai kerugian atas rusaknya jalan itu, diperkirakan mencapai

Rp 8 milyar lebih. Terkait dengan infrastruktur kelistrikan, sejumlah gardu dan tiang listrik dihantam tsunami sehingga tidak bisa mengalirkan listrik. Di Kabupaten Pandeglang, dari 248 gardu yang padam PLN telah berhasil memulihkan 243 gardu distribusi (cnbcindonesia.com, 2019). Sedangkan untuk instansi pengolahan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pandeglang, Banten, tidak alami kerusakan dan tetap beroperasi pasca tsunami (wartaekonomi.co.id, 2019). Ketersediaan air bersih pascabencana merupakan salah satu hal penting dikarenakan jika korban bencana tidak memiliki akses terhadap air bersih, hal tersebut dapat berdampak pada timbulnya penyakit seperti diare dan beberapa jenis penyakit menular lainnya.

Pascabencana tsunami, permasalahan pada pemulihan aspek infrastruktur yang ditemukan adalah belum dilakukannya perbaikan jalan dan jembatan. Menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Pandeglang Lilis Sulistiati mengatakan, total kerugian infrastruktur akibat tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mencapai Rp26 miliar. Bantuan rekonstruksi infrastruktur sendiri baru diajukan ke pemerintah pusat pada pertengahan Juli 2020 lalu. Perbaikan jalan dan jembatan sendiri baru dilakukan sementara dan seadanya untuk memudahkan akses bantuan dan akses masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari (BPBD Kabupaten Pandeglang, 2019).

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang disusun dalam suatu rencana pembangunan di wilayah terdampak bencana yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian dimasukkan dalam penyusunan RAPBD. Sesuai dengan Perka BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana,

prinsip dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi partisipasi, koordinasi, tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga kesinambungan, pembangunan berdasarkan skala prioritas, membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana, meningkatkan kapasitas dan kemandirian, serta mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan keadilan.

Pemulihan pascabencana bidang infrastruktur dan perumahan merupakan prioritas pemerintah dikarenakan kedua sektor ini dianggap paling krusial dalam membantu pemulihan kehidupan masyarakat. Aspek infrastruktur yang rusak akan mengakibatkan perekonomian terganggu bahkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pada aspek lainnya dapat terhambat. Pemulihan pascabencana yang optimal juga bisa membentuk kapasitas masyarakat dan lingkungannya dalam menghadapi bencana di kemudian hari. Hal ini selaras dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia yang mengamanatkan bahwa pemerintahan negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk dapat melindungi segenap bangsa Indonesia maka pemerintah mempunyai kewajiban melindungi dan menjaga rakyatnya dari berbagai bentuk ancaman.

Penelitian ini fokus pada pemulihan perumahan dan infrastruktur pascabencana di Pandeglang. Hal ini dikarenakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan perumahan di Kabupaten Pandeglang dinilai cepat dan berkualitas baik. Cepatnya proses pemulihan perumahan dan infrastruktur pascabencana menjadikan hal ini menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan mulai dari mekanisme lelang pekerjaan sampai kontrol pengawasan dari pemerintah daerah melibatkan masyarakat. Keberhasilan pemulihan pascabencana di bidang perumahan dan infrastruktur yang telah tercapai belum pernah diukur dan dikaji secara komprehensif sebelumnya sebagai salah satu bentuk penilaian kinerja dari program pemulihan.

Kecepatan dan baiknya kualitas beberapa Huntap yang telah dibangun menjadi alasan peneliti untuk melihat bagaimana proses pemulihan pascabencana dari segi koordinasi, pembiayaan dan anggaran serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini belum pernah dilakukan sehingga penelitian ini mempunyai kebaruan (*novelty*). Dengan demikian, peneliti melihat urgensi untuk melihat bagaimana pemulihan pascabencana tsunami Pandeglang di bidang perumahan dan infrastruktur untuk memulihkan kehidupan masyarakat terdampak, bahkan memperbaiki kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

1.2 Fokus dan Subfokus

Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi bidang penelitian untuk memudahkan peneliti, karena peneliti akan terjebak dengan data yang banyak diperoleh di lapangan (Moleong, 2000, h. 237). Fokus dari penelitian ini adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami di Pandeglang Banten. Fokus penelitian ini lebih spesifik dibahas dalam subfokus sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami Pandeglang Banten pada sektor infrastruktur yang meliputi jalan dan jembatan.
- b. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami Pandeglang Banten pada sektor perumahan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bidang Perumahan dan Infrastruktur Pascabencana Tsunami Pandeglang Banten untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak." Sedangkan pertanyaan penelitian yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami

- di Pandeglang untuk pemulihan kehidupan masyarakat terdampak pada sektor infrastruktur ditinjau dari koordinasi, pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat?
- b. Bagaimana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami di Pandeglang untuk pemulihan kehidupan masyarakat terdampak pada sektor perumahan ditinjau dari koordinasi, pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami di Pandeglang untuk pemulihan kehidupan masyarakat terdampak pada sektor infrastruktur ditinjau dari koordinasi, pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Menganalisis rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami di Pandeglang untuk pemulihan kehidupan masyarakat terdampak pada sektor perumahan ditinjau dari koordinasi, pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi bagi penelitian selanjutnya terkait pemulihan pascabencana.
- b. Menjadi tambahan pustaka atau referensi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan menambah pengetahuan dalam perkembangan ilmu manajemen bencana untuk keamanan nasional serta ilmu pertahanan.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk membuat program rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik untuk pemulihan masyarakat terdampak.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi BNPB, BPBD, dan pemerintah untuk menyusun program dan anggaran penanggulangan bencana di wilayah lain.